

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Siti Khoirun Nisak, Ilmi Usrotin Choiriyah*

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i3.5941>

*Correspondence: Ilmi Usrotin Choiriyah

Email: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Received: 29-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 15-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program in Sukorejo Village, Buduran District, Sidoarjo Regency. This research employed a descriptive qualitative method, and the informants were selected using purposive sampling. Data were collected through three techniques: observation, interviews, and documentation. The respondents consisted of KUBE members and program facilitators, including the Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) and the Village Secretary. Secondary data were obtained from scientific journals, articles, and documents related to the implementation of the KUBE program in reducing poverty. The results show that two indicators have been implemented relatively well. First, the communication indicator demonstrates effective and efficient information delivery through both communication media and direct interactions. Second, the bureaucratic structure is well-organized and shows minimal fragmentation. However, two indicators remain suboptimal. The human resource indicator indicates that many KUBE members still lack sufficient understanding of entrepreneurship. In addition, the disposition indicator shows the absence of training and business development programs, as well as limited monitoring and evaluation. Consequently, the commitment of members in implementing the program tends to be inconsistent with the program's objectives.*

Keywords: *Implementation; Joint Business Group (KUBE); Reducing Poverty*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan informan dipilih dengan metode purposive sampling. Data diperoleh melalui 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan responden anggota KUBE dan pendamping dari Kecamatan yaitu TKSK dan Desa yaitu Sekretaris Desa. Data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait implementasi kelompok usaha bersama dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian tentang implementasi program kelompok usaha bersama di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini menunjukkan bahwa 2 indikator yang dinilai sudah cukup optimal dalam pelaksanaannya. Pertama dari indikator komunikasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian informasi baik melalui media komunikasi maupun tatap muka atau langsung. Kedua struktur birokrasi yang baik dan terstruktur serta minimnya fragmentasi. Akan tetapi ada 2 indikator yang belum optimal antara lain yaitu indikator sumberdaya manusia hal ini ditujukan kepada anggota kelompok usaha bersamanya yang belum faham mengenai berwirausaha dan disposisi atau sikap terlihat tidak ada pelatihan ataupun pengembangan tentang wirausaha dan manajemen usaha, monev yang kurang sehingga komitmen anggota tidak stabil untuk melaksanakan program sesuai tujuan.

Kata Kunci: Implementasi; Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Mengurangi Kemiskinan

Pendahuluan

Ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan sumber daya secara efisien, kriteria pengukuran implementasi suatu

program yang efektif antara lain kejelasan tujuan, strategi pencapaian, dan sistem pengawasan yang baik untuk menentukan seberapa jauh hasil yang di capai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan ditetapkan. Pendekatan sasaran memberikan struktur yang jelas dan sistematis untuk mengukur dan meningkatkan peran program. Implementasi kebijakan sangat bergantung pada transmisi yang jelas dan tepat tentang tujuan dan sasaran serta memastikan bahwa semua aktor memiliki gambaran yang sama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan langkah – langkah tertentu. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang mendukung adalah kunci dalam efektivitas implementasi program, tanpa sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung dan memadai, pelaksanaan kebijakan suatu program bisa gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur birokratis yang efektif dan disposisi yang kuat dapat memfasilitasi jalannya implementasi program, dengan struktur yang sistematis membantu dalam manajemen pelaksanaan program, peran implementasi program juga dipengaruhi oleh apakah program tersebut dapat berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan tujuan program yang dicapai tepat waktu. Pemahaman program yang baik, sasaran yang tepat serta waktu implementasi program yang sesuai adalah indikator utama implementasi program.

Pentingnya melakukan analisis data yang progresif dan komprehensif untuk mengevaluasi peran implemementasi program meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang objektif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat program pemerintah berupa bantuan sosial bertujuan mengurangi kemiskinan, dan mendukung kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas dan lansia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui kebijakan dan program yang inovatif dan sesuai sasaran. Menurut Bappenas, kemiskinan terjadi saat individu tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, termasuk akses terhadap air bersih, tempat tinggal layak, pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan [1]. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu sosial yang signifikan dan belum terselesaikan, bahkan cenderung meningkat seiring krisis multidimensional [2]. Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, kenyataannya angka kemiskinan terus bertambah akibat pertumbuhan penduduk, meningkatnya permintaan, dan melemahnya kondisi ekonomi nasional [3]. Melibatkan koordinasi antara berbagai elemen untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat guna. Melaksanakan perbaikan data masyarakat miskin dan rentan melalui registrasi data sosial, program pemberdayaan sosial dari pemerintah diharapkan mampu merubah cara pandang untuk berwirausaha dan mendorong kemandirian masyarakat.

Membangun sistem sosial yang fleksibel dan responsif serta mampu menganalisa dengan cepat dan tepat terhadap perubahan situasi sosial dan ekonomi, yang melibatkan analisis berkelanjutan tentang dampak program bantuan sosial terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial, sehingga masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial masih mejadi tantangan besar di Indonesia. Menggunakan teknologi digital untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lapangan kerja baru sebagai cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas kehidupan. Adapun beberapa program telah dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar

(KIP), dan bantuan usaha atau yang sering dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberdayakan keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu melalui penyediaan bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP), program ini diwujudkan sebagai sebuah kelompok yang berasal, dari, dan dikelola oleh keluarga miskin sendiri, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial mereka. Bantuan yang diberikan oleh program ini bersifat non-tunai dan disalurkan melalui transfer ke rekening kelompok, dimana harapannya dengan adanya KUBE mampu membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan [4].

Program kelompok usaha atau yang disingkat dengan KUBE merupakan inovasi program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga kurang mampu dan fakir miskin dengan memberikan bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif. Setiap kelompok usaha terdiri dari lima sampai sepuluh kepala keluarga yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang kurang mampu, setiap anggota atau setiap KK menerima bantuan dari pemerintah sebesar dua juta rupiah yang berguna keberlangsungan pengemabangan usaha. Setiap KUBE memiliki pendamping sosial untuk membantu anggota dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi usaha dan meningkatkan keterampilan anggota KUBE, agar memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan jaringan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga fakir miskin dan orang kurang mampu sebagai salah satu strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah memberikan dana kepada masyarakat secara langsung untuk kegiatan ekonomi produktif sebagai upaya agar meminimalisir ketergantungan pada bantuan tunai saja. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan).

Dasar hukum pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan bantuan social permodalan melalui kelompok usaha Bersama, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2029 tentang mengatur teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif (UEP) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dyang bertujuan untuk penanganan fakir miskin [5]. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kelompok keluarga miskin atas prakarsanya dalam melaksnaakan usaha ekonomi produksi guna meningkatkan pendapatan keluarga dan mampu mandiri secara ekonomi. Pada tahun 2022 Desa Sukorejo terbentuk kelompok usaha bersama berjumlah 5 kelompok, setiap kelompoknya terdiri dari 9 sampai 10 anggota. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau yang sering di sebut TKSK hanya diberikan tugas 6 bulan dalam pendampingan. Keluarga yang menjadi anggota kelompok usaha bersama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang disingkat menjadi DTKS Kementerian Sosial, pada tahun 2025 data keluarga miskin diperoleh pada a Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kementerian Sosial

secara resmi memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang disingkat DTSEN berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, data tunggal ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola oleh desa dengan pertimbangan data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) tahun 2023 [6]. Syarat menjadi anggota KUBE yaitu keluarga yang berdomisili di Desa Sukorejo, berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang terdata pada sistem IDTKS serta memiliki embrio usaha. Proses pemanggilan anggota yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menginstruksikan TSKK dengan pedoman data dari IDTKS, kemudian TSKK meneruskan informasi ke tiap tiap Desa yang warganya terdata pada IDTKS, Desa Sukorejo mengajukan warganya sesuai dengan persyaratan berlaku, TSKK akan melaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bagi warga yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Jawa Timur membuat rekening pribadi dan harus atas nama yang bersangkutan sesuai data yang telah terverifikasi. Bagi warga yang akan melaksanakan pencairan dana dengan cara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan Surat Pemberitahuan ke Desa Sukorejo dengan tembusan TSKK Buduran. Dana tersebut akan di transfer melalui rekening masing – masing. Proses pelaporan pembinaan oleh TSKK dilakukan secara tertulis dan di emailkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang diambil dari Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) difokuskan pada dashboard rekap DTSEN bahwa secara individu atau anggota keluarga berjumlah 4.209 jiwa dari jumlah keluarga sebesar 1.483 Kepala Keluarga (KK) untuk lebih rinci tiap tingkatan DESIL dan yang belum diperingkatkan ataupun non aktif dapat dilihat table dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu
1	DESIL 1	39	102
2	DESIL 2	50	166
3	DESIL 3	93	277
4	DESIL 4	123	379
5	DESIL 5	147	460
6	DESIL 6-10	849	2.526
7	Belum Peringkatan	145	278
8	Non Aktif	37	21
TOTAL		1.483	4.209

Sumber: IDTKS Desa Sukorejo, 2025

Dari data tingkatan DESIL tersebut, masyarakat yang berpotensi dalam mendapatkan bantuan pemerintah yang menduduki DESIL satu hingga DESIL empat. Kategori tingkatan meliputi:

- DESIL 1 : Bagi masyarakat kategori sangat miskin.
- DESIL 2 : Bagi masyarakat kategori miskin.
- DESIL 3 : Bagi masyarakat kategori hampir miskin.

- DESIL 4 : Bagi masyarakat kategori rentan miskin.
 DESIL 5 : Bagi masyarakat kategori menengah ke atas.

Pelaksanaan KUBE di Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas, peran dan keberlanjutan program tersebut. Permasalahan tersebut terutama terlihat dari dua aspek penting, yaitu aspek komunikasi dan sumber daya manusia (SDM). Sisi komunikasi, banyak kelompok KUBE menghadapi kendala koordinasi baik di internal kelompok maupun dengan pihak pendamping dan instansi terkait, proses komunikasi antara anggota kelompok sering kali belum berjalan secara efektif karena perbedaan pemahaman, kurangnya keterbukaan informasi, serta minimnya budaya musyawarah yang produktif, serta sosialisasi program dari pemerintah terkadang hanya dilakukan pada perwakilan kelompok sehingga sebagian anggota tidak memahami secara utuh maksud, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan program, akibatnya muncul kesalahpahaman dalam pengelolaan bantuan, pembagian tugas, hingga pelaporan kegiatan usaha. Permasalahan komunikasi juga tampak dalam hubungan antara kelompok penerima dengan pendamping sosial. Komunikasi dua arah belum berjalan secara optimal, sehingga kendala yang dihadapi kelompok di lapangan tidak segera mendapat solusi yang tepat. Minimnya kemampuan komunikasi administratif, seperti penyusunan laporan kegiatan dan pelaporan keuangan, turut memperparah situasi.

Di era digital saat ini, sebagian besar kelompok KUBE juga belum memiliki kemampuan komunikasi berbasis teknologi, seperti promosi daring, dokumentasi kegiatan, atau koordinasi melalui media digital, hal ini menyebabkan jangkauan usaha KUBE masih terbatas pada pasar lokal dan sulit berkembang secara berkelanjutan. Aspek sumber daya manusia (SDM), permasalahan utama terletak pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan anggota kelompok. Latar belakang ekonomi yang beragam membuat kemampuan mengelola usaha secara profesional menjadi tidak merata, banyak anggota KUBE belum memahami prinsip dasar kewirausahaan, manajemen keuangan, serta strategi pemasaran yang efektif. Kondisi ini diperburuk dengan masih terbatasnya pelatihan dan pendampingan lanjutan dari pemerintah setelah kelompok menerima bantuan modal. Tanpa bimbingan yang berkelanjutan, kelompok cenderung mengalami stagnasi atau bahkan berhenti beroperasi setelah beberapa waktu. Semangat kerja sama dan kedisiplinan anggota juga masih menjadi tantangan karena peran kepemimpinan di dalam kelompok belum berjalan optimal, karena ketua atau pengurus belum sepenuhnya mampu menjadi motivator dan penggerak bagi seluruh anggota sehingga terjadi ketimpangan peran dan tanggung jawab yang menurunkan produktivitas kelompok, kurangnya regenerasi anggota dan lemahnya kaderisasi menyebabkan keberlanjutan usaha sulit terjaga ketika sebagian anggota tidak lagi aktif.

Tabel 2. Eksistensi KUBE Desa Sukorejo Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Nominal Bantuan	Tingkat Keberhasilan	
				Masih Ada	Gagal
1	2023	5 Kelompok	3 Juta	5	0
2	2024	4 Kelompok	3 Juta	4	1
3	2025	3 Kelompok	3 Juta	3	1

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Keberhasilan program KUBE Desa Sukorejo setiap tahunnya mengalami kegagalan 1 kelompok, hingga saat ini 80% anggota masih aktif 20 % telah gulung tikar hal ini tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan modal, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, tanpa penguatan kedua aspek tersebut, tujuan utama program untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin akan sulit tercapai.

Proses pelaksanaan program kelompok usaha bersama menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan untuk evaluasi keberlangsungan program KUBE, permasalahan yang dihadapi yaitu komitmen anggota yang kurang sehingga KUBE tidak berjalan efektif karena memiliki anggota yang tidak menjalankan kesepakatan kelompok mengutamakan kepentingan pribadi. Kurangnya pelatihan yang relevan dengan jenis KUBE yang dimiliki anggota menyebabkan produksi menurun dan tidak ada peningkatan keterampilan anggota. Persaingan pasar global yang signifikan dan kurangnya daya saing menyebabkan daya jual yang tidak optimal. Monitoring dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik karena sistem dan keberlanjutan yang tidak rutin. Peran pendamping KUBE sangat berdampak pada keberhasilan program ini, pendamping KUBE menjadi fasilitator untuk membantu meningkatkan semangat dan motivasi anggota, fasilitator ide dan inovasi baru dalam menjalankan usaha. Pendamping KUBE harus memiliki jaringan kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai diskusi dan sharing dan pendampingan teknis agar usaha berkembang secara profesional. Memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga anggota mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha untuk kemandirian anggota KUBE. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dilapangan masyarakat penerima KUBE kurang termotivasi sehingga usaha kelompok bersama dapat berhenti ditengah jalan ataupun terjadi konflik antar anggota yang mengakibatkan terhentinya keinginan untuk bekerja secara berkelompok karena mengedepankan kepentingan pribadi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan komunikasi dan sumber daya manusia (SDM). Menurut penelitian Firman, Program KUBE memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan kelompok dalam membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pendamping serta antaranggota [7]. Hal serupa juga ditemukan oleh Munawaroh dalam penelitiannya di Kabupaten Bandung, yang menjelaskan bahwa kurangnya komunikasi antara pendamping sosial dan penerima bantuan menyebabkan sebagian kelompok kesulitan memahami prosedur pengelolaan dan pelaporan kegiatan usaha [8]. Sementara itu, Aprilianti dalam evaluasinya terhadap pelaksanaan KUBE menemukan bahwa rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan program. Banyak anggota kelompok belum memiliki keterampilan manajerial dan kewirausahaan yang memadai untuk mengelola usaha secara mandiri [9]. Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Iwanda pada KUBE Mekar Sari, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok membutuhkan pelatihan lanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pengelolaan usaha Bersama [10]. Dari sisi komunikasi internal, Siregar dkk. melalui

studi dinamika kelompok menemukan bahwa keberhasilan suatu KUBE sangat ditentukan oleh kualitas interaksi dan komunikasi antaranggota. Kelompok dengan tingkat komunikasi terbuka dan kolaboratif cenderung memiliki solidaritas yang tinggi dan mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sebaliknya, kelompok dengan pola komunikasi yang tertutup sering mengalami perpecahan dan penurunan kinerja usaha [11]. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Fachrurozi yang menegaskan pentingnya peran pendamping sebagai mediator komunikasi dan fasilitator pengembangan SDM agar kelompok dapat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan pasar. Aaspek kelembagaan [12], Qodrat dalam studinya di Kabupaten Pandeglang menemukan bahwa sebagian besar KUBE belum memiliki struktur organisasi yang kuat, terutama dalam hal kepemimpinan dan pembagian peran. Lemahnya kepemimpinan internal menyebabkan kurangnya motivasi anggota serta ketidakjelasan arah usaha kelompok. Masalah ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas komunikasi dan pengelolaan SDM di dalam kelompok [13]. Sementara itu, penelitian Melianti dkk. di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa dari 32 kelompok KUBE yang dievaluasi, sebagian besar masih berada pada kategori “berkembang” dan belum ada yang mencapai kategori “maju”, karena lemahnya sistem pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan [14].

Selain itu, Nur Anisa]dalam penelitiannya di Kota Sukabumi menyoroti lemahnya pengawasan dan komunikasi antara Dinas Sosial dengan kelompok penerima bantuan [15]. Minimnya komunikasi dua arah menyebabkan laporan perkembangan usaha tidak tersampaikan dengan baik, sehingga hambatan di lapangan sering tidak tertangani secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan seperti KUBE tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal, tetapi juga oleh sistem komunikasi yang efektif serta kapasitas SDM dalam menjalankan dan mempertahankan usaha bersama. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan KUBE bergantung pada dua aspek utama, yaitu komunikasi yang efektif dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Komunikasi yang baik antara anggota kelompok, pendamping, dan instansi pemerintah akan menciptakan koordinasi yang harmonis, sedangkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan akan memperkuat kemandirian usaha. Oleh karena itu, penting bagi setiap program pemberdayaan masyarakat seperti KUBE untuk tidak hanya berfokus pada bantuan modal, tetapi juga memperhatikan strategi peningkatan kualitas komunikasi dan pengembangan SDM agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III yang menjelaskan tentang keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Komunikasi sebagai pesan dan kejelasan tujuan kebijakan, kebijakan harus jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan, serta konsisten sehingga terjadi pemahaman bersama. Sumber daya yang meliputi staff atau pelaksana kebijakan yang terlatih, fasilitas, dan anggaran sehingga tersediannya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan program. Disposisi atau sikap pelaksana kesesuaian dan kemauan dengan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan, sikap pelaksana kebijakan atau birokrat yang dapat memotivasi dan memberikan solusi para masyarakat dalam melaksanakan program. Struktur birokrasi yaitu sistem operasional prosedur dalam kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi

pelaksana [16]. Tujuan penelitian ini antara lain ketepatan sasaran dari program kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran, Sosialisasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran, efektivitas program kelompok usaha bersama (KUBE) dalam menangani tingkat kemiskinan di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran, pemantauan program kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai peningkatan ketahanan UMKM di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat atau keunggulan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan menggunakan metode kuantitatif [17]. Penelitian kualitatif fokus pada aspek-aspek yang sulit diungkapkan dengan angka atau statistik, dan lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang berbagai fenomena sosial melalui deskripsi dan interpretasi. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin dalam program KUBE di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran dijalankan dan bagaimana program tersebut memengaruhi kesejahteraan mereka. Metode ini memungkinkan untuk mengeksplorasi detail dan nuansa pemberdayaan melalui program KUBE yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan kuantitatif yang lebih berfokus pada angka.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi, lebih mudah memahami konteks sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran program dalam menanggulangi kemiskinan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan. Teknik Penentuan Informan untuk analisis efektivitas program KUBE menggunakan Purposive Sampling. Metode ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengetahuan dan pengalaman mereka terkait program. Informan Terdiri dari Ibu Sriani selaku tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Ibu Ifa selaku anggota KUBE dan ibu putri selaku sekretaris Desa Sukorejo. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini prosesnya dengan melakukan wawancara yang berfokus pada data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, pengumpulan data juga melalui studi pustaka dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesuai dengan referensi yang berkaitan dengan isi penelitian. Berupa kumpulan buku, regulasi perundangan, jurnal-jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Adapun proses dalam menganalisa data penelitian melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan [18].

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang berkembang, tumbuh dan terbentuk dari gagasan dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif dalam mengembangkan tingkat pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. KUBE bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

berwirausaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mandiri memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2022 Desa Sukorejo Kecamatan Buduran mengajukan sebanyak lima Kelompok Usaha Bersama. Desa Sukorejo menjadi salah satu desa di Kecamatan Buduran yang masih eksis untuk implementasi program KUBE. Mengingat potensi desa dengan warga yang mampu dibidang usaha dan banyaknya pabrik, sehingga karyawannya berpotensi menjadi pangsa pasar dan atau pelanggan. Implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan belum berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya karena terdapat hambatan yang menyertai proses implementasi. Menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan George Edward III (1980), implementasi program kelompok usaha bersama dapat diuraikan dari indikator yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Indikator tersebut sebagai acuan dalam menganalisis perkembangan, efektif dan efisiensi program yang berdampak dan mampu menjawab ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan sosial terutama pada tingkat kemiskinan di Desa Sukorejo, agar masyarakat dapat penghidupan yang layak serta mandiri secara finansial keluarganya.

Komunikasi

Menurut teori George C. Edward III dalam Mening,dkk variabel komunikasi sebagai isyarat bahwa implementor mengetahui dan faham apa yang harus dilaksanakan. Komunikasi yang selaras antara pemerintah dan masyarakat menjadi komunikasi dua arah, sehingga komunikasi dibutuhkan pemerintah untuk dapat memutuskan suatu kebijakan yang mampu menjawab permasalahan. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dan gagasan dalam manajemen suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Penyampaian informasi bagi masyarakat Desa Sukorejo melalui surat pemberitahuan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang diturunkan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dengan adanya tembusan untuk tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Hal ini sesuai menurut Edward III terdapat beberapa sub indikator yang perlu dilaksanakan supaya impelmentasi program dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama, anatara lain : transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsisten (*consistency*).

Trasmisi, proses penyampaian informasi dari pemangku kebijakan ke pelaksana untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan program diperlukan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah meliputi komunikasi informasi program, pendampingan dan pelatihan anggota kelompok usaha bersama (KUBE) dalam melaksanakan program, sehingga program yang diberikan akan berdampak secara signifikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pengelompokan Usaha di Balai Desa Sukorejo
Sumber: Hasil Olah Penelitian, 2026.

Prosesnya dimulai dari pengajuan hingga pencairan serta pendampingan pelaksanaan usaha. Setelah adanya surat pemberitahuan oleh Dinas Provinsi melalui Dinas Sosial hingga sampai pada Pemerintah Desa Sukorejo dan mememberitahukan kepada warga, warga dikumpulkan di Balai Desa Sukorejo untuk melaksanakan sosialisasi dan pengelompokan usaha untuk selanjutnya akan membuat proposal pengajuan. seperti yang disampaikan oleh Ibu Putri Ambeg Isnani Selaku Sekretaris Desa Sukorejo :

“Surat Pemberitahuan dari DINSOS, membuat proposal ditujukan ke Bupati Sidoarjo, mereka kan ada usaha terus dikelompokkan sendiri – sendiri, baru kita mintakan bantuan tapi lewat Desa, informasinya melalui RT/RW, kita kan ada kelompok UMKM, awalnya kan kelompok UMKM tapi kan ada syarat harus keluarga miskin yang masuk DTKS, akhirnya kita cari lagi terus kita ajukan. Ada yang gugur dua karena kemarin itu tidak memenuhi kriteria, tidak masuk DTKS, dua orang tertolak, kita kelompok-kelompokan, mengajukan ada lima puluh orang. Nanti pencairannya kan masuk di rekening pribadi” (Hasil Wawancara, 04 Februari 2026)

Pemerintah Desa Sukorejo mengajukan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dari lima puluh orang yang diajukan oleh Pemerintah Desa Sukorejo yang terbagi menjadi lima kelompok yang berarti satu kelompok anggotanya berisikan sepuluh orang. Terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/98/KPTS/013/2023 Tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang dievaluasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya penerbitan Surat Keputusan tersebut, Pemerintah Desa bersama TSKS Kecamatan Buduran melaksanakan pendampingan untuk pembuatan rekening bank jatim di Balai Desa Sukorejo.



Gambar 2. Simbolis Penyerahan Bantuan Pemberdayaan Sosial KUBE Tahun 2023 oleh Bapak Suwandi Selaku Kepala Desa Sukorejo di Balai Desa Sukorejo
Sumber: Hasil Olah Penelitian, 2026

Langkah selanjutnya yaitu penguatan semua aspek program KUBE sebagai upaya untuk mengingatkan kembali tujuan utama program KUBE melalui kegiatan penguatan dan pencairan dana bantuan, hal ini tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat sehingga tujuan KUBE dapat terealisasi dan terwujudkan secara maksimal setelah anggota menerima uang modal berwirausaha. Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku TKSK Kecamatan Buduran:

“Ada juga pemantapan kita jelaskan kembali tujuan KUBE itu apa, pemanfaatan bantuan untuk pemantapan dan mengingatkan kepada anggota tujuan dari KUBE ini, harapannya agar usahanya terus berjalan dan berkembang. Semua dilaksanakan oleh pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga, tapi hanya datang sebagai tamu undangan saja, karena ini kan program Dinsos Provinsi.” (Hasil Wawancara, 06 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Pemerintah Desa Sukorejo telah menyampaikan informasi program dengan jelas dan terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan program tersebut dan selalau mengingatkan akan tujuan utama program. Berdasarkan perbandingan hasil dari penelitian terdahulu di lapangan menurut implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) dalam pemberdayaan fakir miskin terdapat hambatan komunikasi disebabkan tidak meratanya sosialisasi program sehingga banyak yang belum mendapatkan pembinaan atau pendampingan secara baik.

Kejelasan, George Edward III menegaskan bahwa implementasi program berjalan dengan baik perlu adanya arahan pelaksanaannya yang mudah dipahami dan diterima oleh warga sebagai pelaksana program. Oleh karena itu komunikasi dan yang jelas dan singkat yang tidak memberikan makna ganda sehingga memiliki penafsiran yang berbeda-beda oleh pelaksana, sehingga para penerima bantuan tidak lagi kebingungan dalam melaksanakan program KUBE, informasi selalu disampaikan dalam grup *WhatsApp* dan pertemuan rutin tiap satu bulan sekali. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Sriani selaku TKSK Kecamatan Buduran:

“Setelah pemantapan itu kemudian pembinaan, awal – awal pertemuan dirumah-rumah, tiap anggota kelompok banyak yang hadir, sekarang di balai desa, pertemuannya tiap satu bulan sekali. Kami juga adakan tabungan anggota agar teman teman ini bisa ada uang cadangan dan peretmuannya juga hidup, selain membahas permasalahan usahanya dan informasi terbaru.”(Hasil Wawancara, 06 Februari 2026)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan KUBE setelah penyaluran dana dilakukan pembinaan setiap satu bulan sekali, akan tetapi tidak memiliki jadwal yang pasti sehingga membuat kebingungan anggota. Dengan hal tersebut maka dibuatkan grup *WhatsApp* sebagai media untuk memberikan informasi pertemuan rutin dan pemberitahuan mengenai program. Diharapkan komunikasi mengenai

pengembangan kelanjutan program melalui pertemuan rutin dapat diterima dengan efektif informasinya.

Konsisten, Menurut George Edward III dalam penyampaian instruksi dan informasi lainnya dalam pelaksanaannya harus konsisten. Dimaksud konsisten dalam hal ini pada instruksi yang disampaikan agar pelaksana program jelas menerima informasi dan instruksi. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ifa anggota KUBE dalam pertemuan rutin di Balai Desa Sukorejo:

“Mengetahui informasinya melalui grup WhatsApp yang di infokan oleh Bu Sri, tidak ada beda pemahaman antara anggota karena ada pertemuan seperti ini untuk menjelaskan informasi itu, jadi kalau ada yang kurang faham ya tanya saat pertemuan. Semua informasi sesuai dengan instruksi dan arahan dari Bu Sri saja, tidak ada yang lain, kita mengikuti sesuai dengan info dari Bu Sri.” (Hasil Wawancara, 14 Desember 2025)



Gambar 3. Grup *WhatsApp* KUBE Desa Sukorejo
Sumber: Hasil Olah Penelitian, 2026

Berdasarkan wawancara di atas bahwa informasi mengenai pembinaan program dan informasi terbaru mengenai program selalu disampaikan melalui grup *WhatsApp* yang telah dibuat dan adanya pertemuan rutin untuk membantu mereka menyampaikan permasalahan yang dihadapi, konsisten 1 bulan sekali bertempat di Balai Desa Sukorejo, akan tetapi kurang konsisten dalam perihal ketepatan tanggal pelaksanaan atau minggu keberapanya.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah faktor penting dalam pelaksanaan program demi implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, sehingga dalam menjalankan program ini diperlukan sumber daya yang memadai dan berkompeten. Sub indikator yang dikemukakan oleh Edward III antara lain : sumber daya manusia, anggaran, kewenangan dan peralatan serta fasilitas.

Sumber daya manusia, merupakan sub indikator yang sangat penting berperan sebagai aktor dalam implementasi program atau kebijakan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE meliputi pendamping atau tim pembinaan serta anggota KUBE sebagai sasaran program KUBE. Salah satu penyebab kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena sumber daya manusia yang kompetensi sesuai bidang garapnya. Petugas pendampingan KUBE sesuai dengan yang di sampaikan oleh Ibu Putri Ambeg Isnani Sekretaris Desa Sukorejo :

“Kalau itu sub perintah dari pak KADES suruh mendampingi, secara tugas nya itu masuk di bidang KASI KESRA tapi karena kita diperbantukan karena KESRA kan banyak kegiatan ya, ya akhirnya saya dari PEMDES yang mendampingi, kalau dari DINSOS itu ya bu Sri, pendampingan dari awal sampai proses selesai pencairan” (Hasil Wawancara, 04 Februari 2026)

Tim pendamping KUBE Desa Sukorejo ada dua orang yaitu dari unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa yang membantu calon penerima dalam mempersiapkan berkas persyaratan administratif hingga di tetapkan menjadi anggota KUBE Desa Sukorejo. Adapun tim pendamping sebagai berikut :

Tabel 3. Tim Pendamping Program KUBE Desa Sukorejo

No	Nama	Jabatan	Posisi
1	Sriani	TKSK Kecamatan Buduran	Pendamping
2	Putri Ambeg Isnani	Sekretaris Desa	Pendamping

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Tim pendamping dari pemerintahan tingkat Kecamatan ada Ibu Sriani yang memang membidangi atau menjabat sebagai TKSK Kecamatan Buduran. Ada Ibu Putri sebagai sekretaris desa yang menggantikan kasi kesejahteraan dalam mendampingi anggota KUBE, hal ini atas instruksi dari Kepala Desa agar proses pengajuan hingga pencairan dana bisa berjalan dengan baik, cepat dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tim pendamping dan pembinaan sudah cukup sesuai dengan bidang kompetensi, Setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi, maka hasil dari Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, data warga penerima KUBE 2023 Desa Sukorejo yang lolos sebagai penerima bantuan KUBE Anggaran 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 4. Data Warga Penerima KUBE 2023 Desa Sukorejo

N o	Nama	Alama t	Jenis Bantuan	Nilai Uang (Rp)	N o	Nama	Alama t	Jenis Bantuan	Nilai Uang (Rp)
KUBE 1					KUBE 4				
1	Rifaatul Lailatus S.	Sukorejo RT 02 RW 01	Jamu	3.000.000	31	Pitoni	Sukorejo RT 12 RW 04	Prancang an	3.000.000

2	Amanah	Sukorejo RT 07 RW 02	Jamu	3.000.000	32	Muliah	Sukorejo RT 12 RW 04	Warung Kopi	3.000.000
3	Nurul Huda	Sukorejo RT 06 RW 02	Jamu	3.000.000	33	Rohyati	Sukorejo RT 01 RW 01	Warung Kopi	3.000.000
4	Lilik Asiyah	Sukorejo RT 06 RW 02	Jamu	3.000.000	34	Yut Yatin	Sukorejo RT 11 RW 04	Warung Kopi	3.000.000
5	Ridha Khoirul Nisa	Sukorejo RT 11 RW 04	Jamu	3.000.000	35	Latiful Ifaroh	Sukorejo RT 07 RW 02	Warung Kopi	3.000.000
6	Ajisoko 'Atta Fanasya	Sukorejo RT 02 RW 01	Jamu	3.000.000	36	Lubis Ibrahim	Sukorejo RT 07 RW 02	Warung Kopi	3.000.000
7	Yuli Lestari	Sukorejo RT 10 RW 03	Jamu	3.000.000	37	Nanok Setiawan	Sukorejo RT 07 RW 02	Warung Kopi	3.000.000
8	Khalimatus Sa'diyah	Sukorejo RT 01 RW 01	Jamu	3.000.000	38	Yeti Herawati	Sukorejo RT 07 RW 02	Warung Kopi	3.000.000
9	Sri Srtiyowati	Sukorejo RT 12 RW 04	Jamu	3.000.000	39	Isma Ufa	Sukorejo RT 07 RW 02	Warung Kopi	3.000.000
10	Erin Yuniati	Sukorejo RT 09 RW 03	Jamu	3.000.000	40	Nunung Sulistyo Hikari	Sukorejo RT 07 RW 02	Warung Kopi	3.000.000
KUBE 2					KUBE 5				
11	Supatmi	Sukorejo RT 13 RW 04	Prancang an	3.000.000	41	Puji Astutik	Sukorejo RT 10 RW 03	Warung Kopi	3.000.000
12	Purwanti	Sukorejo RT 08 RW 03	Prancang an	3.000.000	42	Endah Setyowati	Sukorejo RT 08 RW 03	Catering Makanan	3.000.000
13	Purnomo	Sukorejo RT 08 RW 03	Prancang an	3.000.000	43	Sunika h	Sukorejo RT 09 RW 03	Catering Makanan	3.000.000

14	Umi Kustiyah	Sukorejo RT 01 RW 01	Prancangan	3.000.000	44	Sri Yuliani	Sukorejo RT 07 RW 02	Catering Makanan	3.000.000
15	Ria Devita Sari	Sukorejo RT 13 RW 04	Prancangan	3.000.000	45	Dwi Anis Andrian	Sukorejo RT 05 RW 02	Catering Makanan	3.000.000
16	Sri Rahayu	Sukorejo RT 10 RW 03	Prancangan	3.000.000	46	Doni Setiawan	Sukorejo RT 01 RW 01	Catering Makanan	3.000.000
17	Yance Lak'apu	Sukorejo RT 11 RW 04	Prancangan	3.000.000	47	Urifah	Sukorejo RT 07 RW 02	Catering Makanan	3.000.000
18	Wiwin W	Sukorejo RT 01 RW 01	Prancangan	3.000.000	48	Winasri	Sukorejo RT 09 RW 02	Catering Makanan	3.000.000
19	Dwi R	Sukorejo RT 03 RW 01	Prancangan	3.000.000	49	Kastun	Sukorejo RT 11 RW 04	Catering Makanan	3.000.000
20	Suwartini	Sukorejo RT 09 RW 03	Prancangan	3.000.000	50	Tri Wahyuni	Sukorejo RT 06 RW 02	Catering Makanan	3.000.000
KUBE 3									
21	Astuti	Sukorejo RT 02 RW 01	Prancangan	3.000.000					
22	Siti Hani'ah	Sukorejo RT 07 RW 02	Prancangan	3.000.000					
23	Sulastri	Sukorejo RT 09 RW 03	Prancangan	3.000.000					
24	Maria Ulfa	Sukorejo RT 02 RW 01	Prancangan	3.000.000					
25	Salami	Sukorejo RT 01 RW 01	Prancangan	3.000.000					

26	Neni Widyaningrum	Sukorejo RT 04 RW 01	Prancangan	3.000.000					
27	Kustinah	Sukorejo RT 10 RW 03	Prancangan	3.000.000					
28	Suparmiyati	Sukorejo RT 06 RW 02	Prancangan	3.000.000					
29	Ida Wahyuningtyas	Sukorejo RT 08 RW 03	Prancangan	3.000.000					
30	Zaenal M	Sukorejo RT 08 RW 03	Prancangan	3.000.000					

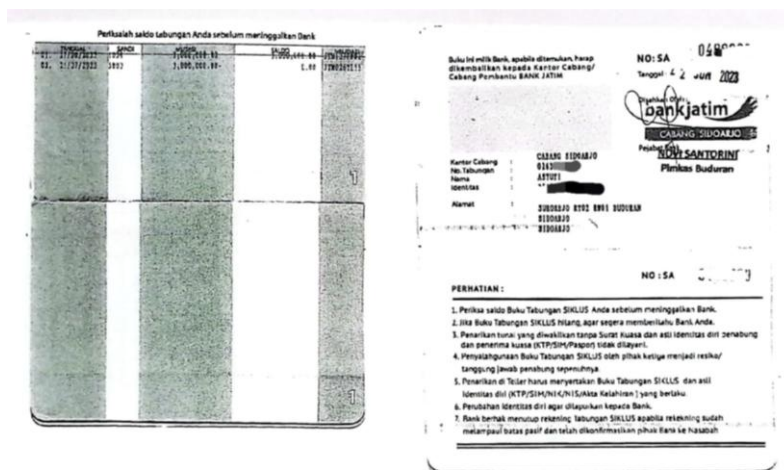
Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/98/KPTS/013/2023

Dari tabel di atas menunjukkan daftar penerima program KUBE di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa penerima dana bantuan KUBE sebanyak 50 orang yang telah dikelompokkan menjadi 5 kelompok sesuai dengan bidang usahanya yang berasal dari Alamat yang berbeda di wilayah Desa Sukorejo. Bantuan dengan nominal Rp 3.000.000 yang diberikan kepada masing-masing penerima sebagai bentuk pengimplementasian program dan kesungguhan serta keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk ekonomi kreatif dan yang terpenting dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui program KUBE.

Sumber daya fasilitas dan anggaran, pada sub indikator ini juga perlu di perhatikan sebagai infrastruktur pendukung dalam memfasilitasi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan program KUBE secara efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai proses manajemen dan koordinasi antar pelaksana program, Ibu Sriani selau TKSK Kecamatan Buduran menjelaskan bahwa

“Pernah dapat informasi, katanya ada tambahan dana untuk pengembangan usaha, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya tentang informasi itu. Anggota ada yang banting stir merubah usahanya yang asalnya dari jualan jamu sekarang jualan bakso.” (Hasil Wawancara, 14 Desember 2025).

Pencairan dana bantuan KUBE hanya satu kali saja pencairan dana yang diterima untuk pembelian bahan baku dan alat usaha yang telah di rencanakan saat pengajuan proposal. Diberikan kepada rekening pribadi masing-masing anggota sesuai dengan Surat Keputusan yang disahkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4. Bukti Penyaluran Dana Melalui Rekening Pribadi
Sumber: Hasil Olah Penelitian, 2026

Setiap anggota melakukan pembuatan rekening Bank Jatim setelah ditetapkan menjadi anggota KUBE yang dipantau langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Setiap anggota berhak menerima dana sebesar Rp 3.000.000,00.

Kewenangan, Menurut George Edward III supaya instruksi dapat dilaksanakan, wewenang bersifat formal dan mengikat. Penetapan anggota KUBE Desa Sukorejo telah di tetapkan sah melalui Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur. Menurut penuturan Ibu Sriani selau TKSK Kecamatan Buduran bahwa:

“Kelompok Usaha Bersama atau KUBE itu programnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, jadi Dinas Sosial Kabupaten dan TKSK hanya mengetahui dan sebagai tembusan saja, Surat Keputusan yang mengeluarkan Gubernur, Pemerintah Desa ada Surat Pemberitahuan. Kalau TKSK tugasnya memang sesuai dengan tanggungjawab atas pekerjaannya, ada Surat Keputusannya juga, tapi hanya 6 bulan itu untuk melaksanakan pendampingan.” (Hasil Wawancara, 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program KUBE ini bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan TKSK melalui surat pemberitahuan dan tanggungjawab tugas sesuai jabatan yang diembannya. Untuk anggota KUBE yang sebagai penerima bantuan kewenangan melaksanakan programnya sesuai dengan Surat Keputusan dan telah di terbitkan oleh Dinasi Sosial Provinsi Jawa Timur. Tidak ada dana untuk pengembangan usaha, hanya satu kali pencairan saja. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul Impelmentasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin oleh Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, Febri Yuliani pada Tahun 2020 bahwa kurangnya anggaran dana yang ditujukan untuk program KUBE menjadikan beberapa pelaksanaan program pengimplementasiannya tidak terselenggara dengan baik.

Disposisi atau Sikap

Indikator ini juga tak kalah penting dalam implementasi program KUBE, juga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program meliputi tiga

unsur yaitu pemahaman terhadap program, komitmen dalam melaksanakan program dan respon terhadap program. Disposisi atau sikap merupakan kemauan dan komitmen pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu program dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama dan telah ditetapkan. Pemahaman yang baik oleh pelaksana program terhadap program KUBE dan komitmen pelaksana serta respon yang baik untuk berkenan mematuhi tugas, hak dan kewajiban pelaksana dalam implementasi program perlu di miliki oleh pelaksana program agar tercapai tujuan dan keberhasilan program.

“Tujuannya ini lo biar masyarakat itu punya usaha, kan menerima itu warga miskin yang masuk di DTKS, warga miskin kan, kalau bisa dia dikasih bantuan ini itu biar bisa usaha, tidak mengharapkan bantuan, setiap satu bulan sekali. Ada yang uang bantuannya itu untuk kebutuhan pribadi tidak untuk pembiayaan usaha, tapi kembali lagi, karena orang ekonomi kebawah seperti itu susah, terus aku mesti ngomong apa” (Hasil Wawancara, 06 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa disposisi atau sikap yang mengintrepretasikan program Kelompok Usaha Bersama Desa Sukorejo kurang adanya komitmen anggota KUBE terhadap pelaksanaan program, pelaksana program yaitu anggota yang menerima bantuan, komitmen anggota untuk usaha mandiri demi meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi rendahnya komitmen sehingga dana yang seharusnya dipergunakan untuk memaksimalkan alat dan bahan usaha yang bagus digunakan untuk keperluan pribadi sehingga nominal dalam pembelian alat dan bahan berkurang dan tidak maksimal dalam membeli yang lebih berkualitas serta tidak dapat melanjutkan usahanya karena perputaran untuk pembelian bahan baku tidak terpenuhi. Kurangnya pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha serta pengembangan usaha, hal ini juga kurangnya monev dan pengawasan dari pemerintah sebagai pembuat program, karena usaha hanya dipantau hingga 6 bulan saja dan sebatas hanya mengetahui bahwa dana sudah dibelikan sesuai dengan rencana pembelanjaan alat dan bahan, tanpa melihat perkembangan ataupun progress usaha secara berkala dan berkelanjutan.

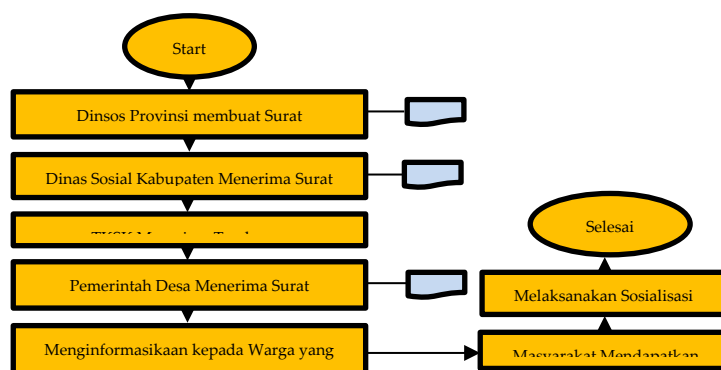
Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan sistem tatanan untuk memastikan tata kelola pelayanan dan keperluan public agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dua karakteristik pada struktur birokrasi yaitu prosedur standar operasi atau SOP dan fargmentasi merupakan kesatuan tindakan atau protokol yang haarus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pihak. Sedangkan fragmentasi atau penyebrangan sebagai pendistribusi dalam berbagai aspek program sesuai dengan sektor kompetensinya.

Standard Operational Procedure (SOP) adalah progress yang sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses birokrasi agar berjalan dengan optimal, efektif dan efisien dalam mencapai standar kualitas dari hasil. Bu Sriani selaku TKSK Kecamatan menuturkan bahwa:

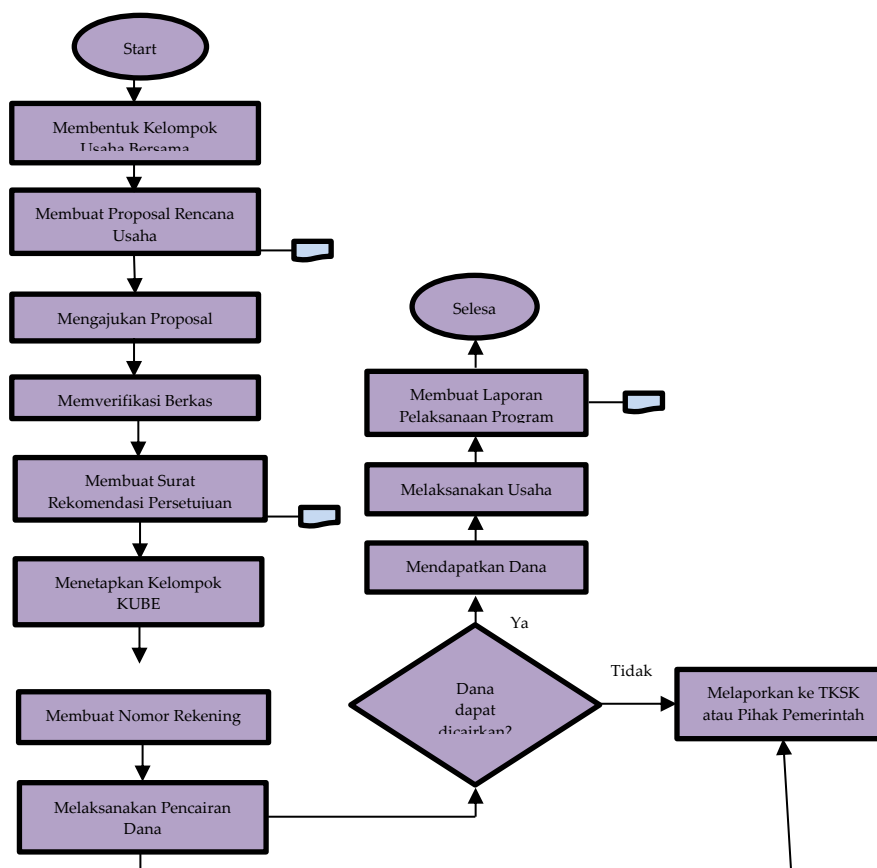
“kalau dari surat tugasnya hanya 6 bulan saja pendampingan, untuk pendampingan selanjutnya atas kesadaran sendiri tanpa ada surat tugas, yang laporan ke Dinas Sosial Provinsi saya saja sebagai TKSK selama 6 bulan itu, anggota tidak. Ya saya ingin usahanya terus berjalan. Kalau untuk monev langsung dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ke anggota pernah setelah pencairan, hanya dilihat apakah benar sudah dibelikan untuk usahanya, kemudian monev kedua setelah enam bulan itu langsung di datangi ke rumahnya, ke tempat usahanya, tidak ada pelatihan.” (Hasil Wawancara, 06 Februari 2026)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KUBE Desa Sukorejo belum ada SOP dalam pembinaan atau pendampingan dan tidak ada SOP untuk pelaporan progres dari usaha anggota KUBE. Sehingga pendampingan ataupun pertemuan rutin dalam evaluasi perkembangan usaha tidak ada jadwal tertentu yang pasti untuk mendukung keberhasilan program. Hal ini seperti yang tertuang pada penelitian terdahulu oleh (Ningtyas, 2017) yang berjudul Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang menyatakan bahwa keberhasilan implemntasi kebijakan harus didukung dengan struktur organisasi yang baik, salah satu aspek itu adalah adanya prosedur operasional yang sesuai standar. Implementor ada pendoman dalam melaksanakan tugas dan bertindak. Berikut alur penyampaian informasi bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE):



Gambar 5. Alur Penyampaian Informasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dari flowchart di atas pemberitahuan program KUBE dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik program untuk memberikan informasi program secara bertahap secara vertikal mulai kepada Dinas Sosial Kabupaten dan dilanjutkan pada tiap Kecamatan dan Desa sampai tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima atau pelaksana program. Setelah informasi tersampaikan kepada masyarakat, penerima program melaksanakan kegiatan program. Adapun alur implementasi kelompok usaha bersama (KUBE) Desa Sukorejo sebagai berikut :



Gambar 6. Alur Implementasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Sukorejo

Implementasi program dilaksanakan dengan beberapa syarat administrasi meliputi pembuatan proposal rencana usaha, pembuatan nomor rekening tiap anggota guna pencairan dana, pembelian bahan dan alat untuk usaha dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan berwirausaha dan berakhir membuat laporan pelaksanaan program, hal ini membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang diterima, mulai dari indikasi masalah dan pemecahan masalah, penggunaan anggaran sampai bukti bahan atau alat yang dibeli.

Fragmentasi, sebagai sub indikator struktur birokrasi bentuk pembagian tanggungjawab kebijakan di antara beberapa sektor atau unit yang dapat menyebabkan tumpang tindih dan rumit.

“Ini program Dinas Sosial Provinsi, semua kegiatan dipantau langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ada petugas yang monev itu juga langsung dari Provinsi, awal yang membuat rekening juga di pantau provinsi, kemudian laporan pertanggungjawaban juga yang cek dari petugas provinsi waktu yang sosialisasi dan pelaksanaan peyaluran bantuan juga dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang dari Kabupaten hanya sebagai tamu undangan saja.” (Hasil Wawancara, 06 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada fragmentasi struktur birokrasi, maka proses implementasi lebih baik dan efektif. Dengan

fragmentasi semakin sedikit, maka implementasi program tidak ada double instruksi bahkan tumpang tindih informasi.

Kesimpulan

Implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat fakir miskin oleh Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa indikator yang perlu dicermati meliputi komunikasi yaitu pemerintah Desa Sukorejo telah menyampaikan informasi program dengan jelas dan terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan program tersebut dan selalau mengingatkan akan tujuan utama program, informasi mengenai pembinaan program dan informasi terbaru mengenai program selalu disampaikan melalui grup WhatsApp dan pertemuan rutin tiap bulan sekali; sumber daya, tim pendamping dan pembinaan sudah cukup sesuai dengan bidang kompetensi, akan tetapi untuk anggota belum memahami tentang berwirausaha; disposisi atau sikap, komitmen anggota untuk usaha mandiri demi meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi rendahnya komitmen sehingga dana yang seharusnya dipergunakan untuk memaksimalkan alat dan bahan usaha yang bagus digunakan untuk keperluan pribadi sehingga nominal dalam pembelian alat dan bahan berkurang dan tidak maksimal dalam membeli yang lebih berkualitas; dan struktur birokrasi KUBE Desa Sukorejo belum ada SOP dalam pembinaan atau pendampingan dan tidak ada SOP untuk pelaporan progres dari usaha anggota KUBE, untuk tidak ada fragmentasi struktur birokrasi, maka proses implementasi lebih baik dan efektif. Dengan fragmentasi semakin sedikit, maka implementasi program tidak ada double instruksi bahkan tumpang tindih informasi. Indikator tersebut menjadi hal penting dalam menentukan tingkat kesuksesan implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Perlu adanya peningkatan komitmen para pelaksana program KUBE untuk memberikan cara pandang yang lebih luas melalui pendidikan maupun pelatihan kewirausahaan, serta perlunya pengawasan yang berkelanjutan untuk meningkatkan tanggungjawab dan kesungguhan dalam melaksanakan usaha. Pelatihan dan Pendidikan kewirausahaan ini perlu dalam untuk bekal para pelaksana dalam mengelola usahanya. Dinas Sosial juga perlu dalam perbaikan mekanisme dan metode evaluasi, monitoring, dan controlling dalam hal ini termasuk laporan pelaksana program, sehingga program ini dijalankan secara profesional, komitmen yang kuat dan sesuai dengan standart operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah khususnya pendamping pelaksana program harus dapat memberikan motivasi dan dukungan moral dengan cara memberikan penghargaan dan sanksi kepada pelaksana program KUBE, hal ini sebagai bentuk peningkatan ketaatan pelaksana program untuk menjalankan usahanya dengan memerhatikan standar yang jelas dan akuntabel serta dilakukan secara konsisten keberlanjutan.

Daftar Pustaka

- [1] R. Harahap et al., Analisis Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem melalui Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat. Jakarta, Indonesia: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023. DOI: not available.

-
- [2] J. Setitit, "Dinamika Isu Sosial dan Eskalasi Kemiskinan Pasca Krisis Multidimensional di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 1, 2024. DOI: not available.
- [3] A. Burnama, *Implementasi Pasal 34 UUD 1945: Realitas Angka Kemiskinan di Tengah Pertumbuhan Penduduk dan Tekanan Ekonomi Nasional*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Kebijakan, 2024. DOI: not available.
- [4] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Jakarta, Indonesia: Kemensos RI, 2019.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.
- [6] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)*, 2025.
- [7] A. Firman, "Dampak Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin," *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 9, no. 1, pp. 1-9, 2020, doi: 10.37476/jbk.v9i1.848. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- [8] S. Munawaroh, "Kendala Komunikasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Program KUBE di Kabupaten Bandung," *Sosio Konsepsia*, vol. 11, no. 3, 2022. DOI: not available.
- [9] D. Aprilianti, "Evaluasi Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Penghambat Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 1, 2019. DOI: not available.
- [10] R. Iwanda, "Analisis Keberlanjutan Usaha pada KUBE Mekar Sari: Tantangan Keterampilan dan Manajemen Kewirausahaan," *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, vol. 12, no. 1, 2024. DOI: not available.
- [11] H. Siregar et al., "Studi Dinamika Kelompok: Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Solidaritas Anggota KUBE," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, vol. 21, no. 2, 2023. DOI: not available.
- [12] N. Fitria and M. Fachrurozi, "Peran Pendamping Sosial sebagai Fasilitator dan Mediator dalam Pengembangan Kapasitas SDM KUBE," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, vol. 10, no. 4, 2023. DOI: not available.
- [13] M. Qodrat, "Kajian Aspek Kelembagaan dan Struktur Kepemimpinan dalam Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pandeglang," *Skripsi/Tesis*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia, 2017.
- [14] Melianti et al., "Analisis Tingkat Perkembangan KUBE di Kota Palangka Raya: Evaluasi Sistem Pelatihan dan Pendampingan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2022. DOI: not available.
- [15] S. Nur Anisa, "Efektivitas Pengawasan dan Komunikasi Birokrasi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 2, 2022. DOI: not available.
- [16] G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy*. Washington, DC, USA: Congressional Quarterly Press, 1980.

-
- [17] S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Indonesia, 2023.
- [18] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- [19] J. Tampubolon, B. G. Sugihen, M. Samet, D. Susanto, and Sumardjo, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama/KUBE)," *Jurnal Penyuluhan*, vol. 2, no. 2, 2006, doi: 10.25015/penyuluhan.v2i2.2122. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- [20] T. A. Zulkarnain, M. Heriyanto, and F. Yuliani, "Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin," *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, vol. 1, no. 1, pp. 10–18, 2021, doi: 10.46730/jsdmu.v1i1.10. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- [21] Herniyati, H. As'ari, and Adianto, "Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, vol. 6, no. 2, pp. 475–483, 2022, doi: 10.31604/jim.v6i2.2022.475-483. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- [22] F. M. Aulia, "Urgensi Satu Data Terperingkat dalam Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem 'Nol' Persen," *Bappenas Working Papers*, vol. 7, no. 3, 2024, doi: 10.47266/bwp.v7i3.362. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- [23] D. Melinawati, "Pengaruh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Kemampuan Berwirausaha Keluarga Sangat Miskin di Kabupaten Wonogiri," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 1, no. 1, pp. 11–24, 2020, doi: 10.58326/jurnallisyabab.v1i1.8. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- [24] Wulpiah, "Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, vol. 4, no. 1, 2018, doi: 10.32923/sci.v4i1.1038. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- [25] M. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1980, doi: 10.1515/9781400886098.